

Strategi Pemenangan Calon Legislatif PDI-P dalam Kontestasi Pemilihan Umum Tahun 2024

Shabrillah Murni^{1*}, Kushandajani², Rina Martini³

*Corresponding Author: shashabrillah@gmail.com

^{1,2,3} Universitas Diponegoro

DOI: 10.22219/jurnalsospol.v11i2.40374

Abstract

The 2024 Indonesian general election posed a major challenge for the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) due to internal tensions between the party's central leadership and President Joko Widodo, resulting in intra-party elite conflict. This study examines the electoral strategies employed by PDI-P legislative candidates amidst this conflict, focusing on how political loyalty and grassroots mobilization were managed by the party structure. Utilizing a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews with five key informants and three supporting informants, as well as document analysis. The findings reveal that despite national-level tensions, regional candidates adhered to a "loyal vertical alignment" with the party's central leadership and executed ground-level strategies rooted in Marhaenist ideology. A unique feature of their campaign involved the SLJJ pattern (Sonjo, Layat, Jagong, Jagongan), reflecting deep cultural engagement with constituents. This study contributes to the literature on party organizational resilience and electoral strategy under intra-party conflict conditions.

Abstrak

Pemilu 2024 menjadi titik kritis bagi PDI Perjuangan ketika terjadi ketegangan antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan Presiden Joko Widodo, yang turut memunculkan konflik loyalitas di tingkat elite partai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemenangan yang dijalankan oleh calon anggota legislatif PDI Perjuangan di tengah konflik elite tersebut, serta melihat bagaimana arah dan loyalitas politik kader diarahkan oleh DPP. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima informan kunci dan didukung oleh tiga informan tambahan, serta dokumentasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemenangan tetap berjalan secara konsisten di daerah dengan mengandalkan prinsip "tegak lurus" terhadap instruksi DPP dan pendekatan akar rumput berbasis ideologi Marhaenisme. Salah satu strategi khas yang muncul adalah pola interaksi SLJJ (Sonjo, Layat, Jagong, Jagongan) yang mengakar kuat dalam budaya politik lokal. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi konflik di level pusat, struktur partai yang terorganisasi dan loyalitas ideologis kader mampu menjaga kestabilan mesin politik di daerah. Studi ini memberikan kontribusi terhadap kajian tentang resiliensi organisasi partai dan strategi elektoral dalam konteks konflik intra-partai.

Keywords

Calon legislatif, konflik elit, kontestasi, pemilihan umum, strategi pemenangan

Article History

Received March, 29

Revised June, 14

Accepted June, 24

Published June, 25

Corresponding Author

Shabrillah Murni,
Universitas Diponegoro,
Jl. Prof. Soedarto No.13,
Tembalang, Kec. Tembalang,
Kota Semarang, Jawa Tengah
50275.

Pendahuluan

Politik Indonesia kini tengah mengalami kekacauan yang dikarenakan dampak dari sistem rekrutmen dan pola interaksi internal partai politik yang cenderung bersikap pragmatis. Selain itu juga disebabkan adanya inkonsistensi para kader untuk memperjuangkan visi dan misi partai karena adanya benturan kepentingan politik (Hawari, 2019). Pemilu 2024 menunjukkan kekacauan politik dengan adanya revisi oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum khususnya pada pasal 169 huruf (q). Revisi ini mengubah syarat usia calon presiden dan atau wakil presiden menjadi paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk juga dalam pemilihan kepala daerah.

Revisi sebagaimana dilakukan oleh MK tersebut kemudian memberikan peluang kepada kalangan tertentu untuk turut berpartisipasi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Kalangan tertentu di sini yaitu Gibran Rakabuming Raka selaku putra dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam kondisi ini, Jokowi telah mengambil sikap bahwa dirinya akan ikut campur di dalam Pilpres 2024 yang mana sikap tersebut menjadi sorotan publik sehingga menuai pro dan kontra karena adanya ketidaknetralan seorang Presiden (Simamora & Rusadi, 2024).

Kondisi ini menyebabkan internal PDI Perjuangan menjadi cukup tegang karena Megawati menilai bahwa Jokowi memiliki preferensi tersendiri ketika PDI Perjuangan telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden Republik Indonesia (Safrudiningsih, Dina Sudarmika, 2023). Dari sinilah muncul keretakan antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan dengan Jokowi. DPP PDI Perjuangan mengambil langkah dengan mengeluarkan perintah kepada para caleg untuk ikut memenangkan Capres dan Cawapres yang diusung PDI Perjuangan yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Instruksi tersebut berjudul "Instruksi Bergerak Secara Masif Memenangkan Pemilu 2024" dengan nomor 5775/IN/DPP/XII/2023.

Pasalnya, keberhasilan dalam pemilihan umum tidak akan terlepas dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi yang tentunya dipersiapkan dengan matang sehingga persuasi kepada pemilih dapat terus dilakukan dengan tujuan akhir bahwa mereka akan memberikan dukungan suara untuk memilih partai maupun kandidat tertentu (Lubis, 2017). Strategi politik merupakan rangkaian metode yang dilakukan untuk memenangkan persaingan dalam politik dalam mendapatkan kekuasaan dengan modal yang dimiliki partai politik maupun kandidat pada daerah pemilihan tertentu (Khasanah, 2022). Selain itu, strategi kemenangan juga penting dilakukan untuk mendapatkan dukungan suara dari masyarakat sebagai pemilih (Plaituka et al., 2018).

Adanya fenomena konflik internal antara DPP PDI Perjuangan dengan Jokowi kemudian mendorong peneliti untuk meneliti konflik elite dan strategi kemenangan yang diterapkan oleh caleg fraksi PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah pada pemilu 2024. Dalam merancang penelitian ini, peneliti meninjau beberapa penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya terkait strategi kemenangan melalui marketing politik (Sepriansyah et al., 2021). Berikut merupakan strategi marketing politik yang sering digunakan oleh calon anggota legislatif yang pertama strategi marketing politik 4P yang terdiri dari *positioning*, *policy*, *party*, dan *presentation* (Rosyid Halimur, 2019). Yang kedua ada strategi *push*, *pull* dan *pass marketing* (Fadhillah dan Al-Rafni, 2018). Strategi marketing politik dianggap lebih efektif (Rahagi, 2019). Namun

perlu disadari bahwa penerapannya memerlukan banyak perbaikan karena strategi ini mengaplikasikan bidang ekonomi ke bidang politik (Sanjaya, 2017).

Penelitian terdahulu juga membahas strategi pemenangan dengan modal sosial di mana modal sosial ini tentu harus dibarengi dengan modal politik yang memadai. Antara modal sosial dan modal politik tersebut nantinya diimplementasikan secara konsisten dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan menjadi wakil rakyat yang amanah (Heriyanto & Solihah, 2023). Bagi calon anggota legislatif perempuan, mereka meyakini bahwa modal politik dan modal sosial merupakan hal krusial untuk memenangkan suara di tengah patriarki politik yang semakin masif (Ramadhany & Rahmawati, 2020). Namun terkadang modal sosial dan modal politik tidak selalu menentukan kemenangan calon anggota legislatif (Habibullah et al., 2022).

Kajian lain juga menyoroti peran konflik elite dalam melemahkan soliditas partai dan kohesi kader (Tomsa, 2020; Buehler, 2021). Meskipun demikian, masih terbatas kajian yang secara khusus menelaah bagaimana strategi pemenangan dirumuskan dan dijalankan oleh calon legislatif dari partai berkonflik, khususnya dalam konteks PDIP yang memiliki struktur organisasi kuat dan akar ideologis yang panjang. Selain itu, terdapat celah dalam literatur mengenai bagaimana loyalitas politik dibentuk dan dipertahankan di tengah tekanan konflik elite, serta bagaimana strategi berbasis budaya lokal seperti pola SLJJ (Sonjo, Layat, Jagong, Jagongan) dimanfaatkan dalam memperkuat interaksi dengan konstituen.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berfokus menganalisa bagaimana strategi pemenangan dijalankan oleh calon anggota legislatif PDI Perjuangan dalam Pemilu 2024 di tengah konflik elite internal partai. Oleh karena itu, paparan inti dalam penelitian ini berupaya menelusuri dinamika relasi antara struktur partai pusat dan daerah, pola komunikasi politik di akar rumput, serta bentuk loyalitas kader terhadap garis politik DPP di tengah tekanan politik nasional. Studi ini menawarkan kebaruan dalam dua hal. Pertama, penelitian ini secara eksplisit mengaitkan konflik elite internal partai dengan strategi elektoral di tingkat legislatif lokal, sebuah perspektif yang masih jarang dieksplorasi dalam literatur Indonesia. Kedua, temuan mengenai pola interaksi politik berbasis kearifan lokal seperti SLJJ memperlihatkan bagaimana budaya politik tradisional tetap menjadi instrumen penting dalam mengatasi jarak ideologis antara partai dan masyarakat pemilih. Dengan demikian, studi ini memperluas cakupan kajian tentang ketahanan organisasi partai dan adaptasi strategis di tengah tekanan konflik internal.

Tulisan ini disusun dalam enam bagian utama. Bagian pertama menyajikan pendahuluan yang mencakup konteks, rumusan masalah, dan kontribusi penelitian. Bagian kedua memaparkan kerangka teori yang mencakup teori pusat-pinggiran Wallerstein serta konsep loyalitas politik dan fragmentasi elite. Bagian ketiga menjelaskan metode penelitian kualitatif studi kasus yang digunakan, termasuk teknik pengumpulan dan analisis data. Bagian keempat menyajikan temuan lapangan dan pembahasan yang disusun berdasarkan tema-tema strategis seperti loyalitas terhadap DPP, strategi akar rumput, dan penggunaan budaya politik lokal. Bagian kelima menyimpulkan temuan utama dan mengaitkannya dengan kontribusi teoretis. Terakhir, bagian keenam memberikan saran untuk penelitian lanjutan dan implikasi praktis bagi penguatan strategi partai politik dalam konteks konflik internal.

Kerangka Analisis

Guna memahami strategi pemenangan calon legislatif PDI Perjuangan pada Pemilu 2024 di tengah konflik elite internal, diperlukan kerangka konseptual yang mampu menjelaskan dinamika relasi kuasa dalam tubuh partai, serta bagaimana ketegangan di tingkat pusat dimediasi oleh aktor politik di daerah. Untuk itu, penelitian ini menggunakan teori pusat–pinggiran dari Immanuel Wallerstein sebagai perspektif struktural, yang dilengkapi dengan konsep loyalitas politik dan fragmentasi elite untuk menjelaskan dinamika internal partai dan perilaku kader dalam merespons tekanan politik dari atas. Kerangka ini dipilih untuk menangkap relasi dialektis antara garis ideologis partai dan strategi elektoral yang dijalankan aktor lokal di akar rumput.

Teori Pusat-Pinggiran Immanuel Wallerstein dalam Konteks Strategi Politik Partai

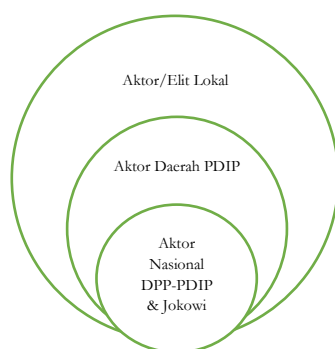
Partai politik merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Partai politik sendiri diartikan sebagai sebuah kelompok dengan target untuk mendapatkan suatu jabatan sipil dan membangun struktur di pemerintahan melalui cara pencalonan yang nantinya harus bersaing di dalam sebuah ajang pemilihan umum. Partai politik tidak hanya dimaknai sebagai alat atau perantara dalam pertarungan politik namun di dalamnya juga terdapat agregasi kepentingan masyarakat secara luas yang perlu diperjuangkan nantinya (Kodiyat MS, 2019). Oleh karena itu, dalam pemilihan umum menempatkan masyarakat sebagai seorang pemilih yang berhak turut menentukan wakil-wakilnya yang akan menduduki badan-badan perwakilan rakyat untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Di sinilah pemilihan umum dimaknai sebagai partisipasi politik berupa kegiatan masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah (Arniti, 2020).

Selain dimaknai sebagai perantara dalam pertarungan politik, partai politik juga dapat dimaknai sebagai sebuah organisasi dalam kekuasaan politik. Partai politik dalam konsep organisasi sama halnya memiliki prosedur, disiplin dan struktur yang terbentuk mulai dari tingkat lokal hingga pusat. Struktur partai politik sebagaimana dipahami ini tentu akan turut mempengaruhi dan mempermudah kontrol dari bagian terkecil hingga ke pusat dan begitu juga sebaliknya. Jika terjadi sebuah gejolak di pusat akan mempengaruhi segala keputusan hingga ke daerah, dan begitu sebaliknya. Jika terjadi gejolak di daerah tentu akan mempengaruhi segala keputusan di pusat. Kondisi ini juga tercermin ketika terjadi konflik elite yang jika terjadi sengketa pada elite nasional maka nantinya akan berpengaruh kepada elite lokal (Pradityo, 2018). Ini merupakan bukti bahwa partai politik dapat dimaknai sebagai sebuah organisasi.

Sistem dunia menurut Wallerstein memiliki sebuah struktur dengan hierarki. Adapun klasifikasi hierarki tersebut berupa center (pusat) dan periphery (pinggiran) (Butler & Le, n.d.). Berikut bagan dari teori center & periphery. Teori pusat–pinggiran yang dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein (1974) pada awalnya digunakan untuk menjelaskan pola relasi struktural dalam sistem ekonomi dunia, di mana negara-negara pusat mendominasi proses produksi, distribusi nilai tambah, dan penguasaan kapital, sementara negara-negara di pinggiran bergantung pada sistem yang dikendalikan pusat dan berfungsi sebagai pemasok tenaga kerja serta komoditas mentah. Dalam perkembangan selanjutnya, teori ini telah mengalami perluasan aplikatif ke dalam berbagai ranah kajian ilmu sosial, termasuk studi organisasi, sosiologi politik, dan kajian institusi politik seperti partai.

Dalam konteks organisasi partai politik, konsep pusat–pinggiran digunakan untuk memahami distribusi kekuasaan antara elite nasional (pusat) dan struktur di tingkat lokal (pinggiran). Pusat tidak hanya menjadi produsen kebijakan dan garis ideologi, tetapi juga bertindak sebagai pengontrol wacana dan legitimasi politik partai. Di sisi lain, aktor-aktor di pinggiran, seperti kader daerah, pengurus cabang, dan calon legislatif di level lokal, berperan sebagai perpanjangan tangan dari pusat, meskipun sering kali harus menyesuaikan dengan kondisi sosiokultural dan politik yang berbeda dengan arahan pusat.

Gambar 1. Relasi Pusat-Pinggiran dalam konteks strategi politik PDIP



Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Theoretical Framework Center & Periphery (Wallerstein, 2020)

Jika melihat pada gambar 1 di atas, dapat dilihat bahwa dalam konteks PDIP, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) berfungsi sebagai pusat dominan yang menetapkan arah ideologis, termasuk narasi besar perjuangan Marhaenisme dan strategi komunikasi resmi partai. Sementara itu, calon legislatif di daerah berfungsi sebagai penghubung antara garis pusat dengan basis pemilih. Posisi pinggiran ini tidak pasif, tetapi bersifat dinamis, karena kader lokal harus mampu membaca situasi sosial dan melakukan artikulasi ulang terhadap pesan-pesan pusat agar tetap relevan dengan konteks lokal. Hal ini menjadi sangat penting terutama dalam situasi di mana terjadi ketegangan politik antara pusat dan aktor-aktor elite nasional seperti Presiden yang sebelumnya merupakan kader partai.

Penelitian ini memanfaatkan kerangka pusat–pinggiran Wallerstein untuk menelusuri bagaimana “instruksi politik” dari pusat PDIP diartikulasikan dan dijalankan di tingkat lokal. Secara operasional, konsep ini diterapkan dalam tiga aspek. Pertama, saluran komunikasi vertikal antara pusat dan pinggiran dianalisis untuk melihat konsistensi dan kontinuitas penyampaian pesan partai. Kedua, derajat loyalitas terhadap garis partai diukur melalui kesesuaian narasi kampanye, penggunaan simbol ideologis, dan sikap kader terhadap keputusan DPP. Ketiga, mekanisme adaptasi strategi di lapangan menjadi penting untuk memahami bagaimana calon legislatif memodifikasi pendekatan kampanye sesuai dengan realitas sosial politik daerah tanpa menyalahi mandat dari pusat.

Melalui pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya melihat bagaimana konflik elite berdampak pada organisasi partai secara vertikal, tetapi juga mengeksplorasi kapasitas pinggiran untuk bernegosiasi antara kesetiaan struktural dan kebutuhan elektoral di tingkat basis. Dengan

demikian, teori pusat–pinggiran Wallerstein tidak hanya berfungsi sebagai kerangka makro, tetapi juga sebagai alat analisis untuk memahami dinamika kekuasaan internal partai dalam skala yang lebih mikro dan kontekstual.

Loyalitas Politik dan Fragmentasi Elite dalam Dinamika Strategi Elektoral Partai

Loyalitas politik merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga soliditas dan efektivitas organisasi partai politik, terutama dalam sistem politik yang mengandalkan struktur kolektif dan sentralisasi kebijakan seperti di Indonesia. Dalam konteks partai, loyalitas tidak hanya dimaknai sebagai ketaatan administratif terhadap keputusan pimpinan, tetapi juga mencerminkan keterikatan ideologis, konsistensi strategi komunikasi, serta kesetiaan terhadap garis perjuangan partai. Sebagaimana diungkapkan oleh Panebianco (1988), loyalitas politik dalam partai bersifat multidimensi—meliputi kepatuhan struktural, identifikasi ideologis, dan keterlibatan emosional terhadap simbol dan nilai-nilai partai.

Dalam situasi konflik elite, loyalitas politik menjadi variabel krusial yang menentukan apakah struktur partai mampu bertahan sebagai satu kesatuan yang kohesif atau justru terpecah akibat tarikan kepentingan personal dan faksionalisme internal. Konflik elite sendiri dapat menciptakan ruang abu-abu dalam distribusi loyalitas kader, khususnya di tingkat daerah, di mana mereka harus memilih antara mengikuti garis partai pusat (DPP) atau merespons pengaruh aktor elite lain yang memiliki kapital politik kuat, seperti Presiden. Fenomena ini sangat relevan dalam konteks Pemilu 2024, di mana ketegangan terbuka antara DPP PDIP dengan Presiden Joko Widodo—yang tidak lagi berada dalam garis resmi partai—menimbulkan fragmentasi loyalitas di kalangan kader dan simpatisan.

Dalam penelitian ini, loyalitas politik dioperasionalkan melalui tiga indikator utama. Pertama, kesediaan kader untuk mengikuti instruksi resmi dari DPP, baik dalam hal strategi komunikasi kampanye, pencitraan tokoh partai, maupun afiliasi resmi dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung PDIP. Dalam hal ini, posisi kader daerah terhadap Ganjar Pranowo—yang merupakan calon dari PDIP—dan sikap mereka terhadap manuver politik Jokowi dan Gibran menjadi indikator krusial dari kepatuhan struktural.

Kedua, konsistensi dalam penggunaan simbol dan jargon ideologis partai menjadi indikator loyalitas ideologis. Penggunaan warna merah, lambang banteng, narasi Marhaenisme, serta jargon-jargon khas seperti “tegak lurus” atau “petugas partai” bukan sekadar elemen estetis, melainkan simbol penting dari keterikatan kader terhadap akar ideologi PDIP. Dalam berbagai studi, simbol ideologis terbukti memiliki fungsi pengikat kolektif yang menjaga identitas organisasi di tengah fluktuasi politik (Scarrow, 2006). Terakhir, sikap kader terhadap fragmentasi narasi elite menjadi indikator loyalitas politik dalam dimensi diskursif. Misalnya, bagaimana kader di tingkat lokal menanggapi perbedaan narasi antara DPP PDIP yang mendukung Ganjar dan kelompok Jokowi yang mendukung Prabowo–Gibran. Dalam situasi seperti ini, loyalitas tidak hanya diuji melalui kepatuhan struktural, tetapi juga kemampuan kader untuk menjaga konsistensi narasi dan menolak kompromi yang dapat mencederai garis partai.

Sementara itu, fragmentasi elite adalah kondisi ketika solidaritas dalam tubuh elite partai terpecah karena adanya perbedaan kepentingan, strategi politik, atau identitas kepemimpinan. Higley dan Burton (2006) menyatakan bahwa fragmentasi elite berpotensi mengganggu stabilitas institusional karena menghasilkan konflik terbuka, perebutan wacana, dan pelemahan koordinasi

politik. Dalam konteks PDIP, fragmentasi ini muncul dalam bentuk afiliasi ganda sejumlah elite daerah dan nasional terhadap dua kutub kekuasaan: Megawati Soekarnoputri sebagai simbol ideologis dan struktural partai, serta Joko Widodo sebagai figur presiden incumbent dengan pengaruh kuat di akar rumput.

Fragmentasi elite dalam penelitian ini dioperasionalkan melalui tiga dimensi. Pertama, pola relasi informal antara kader daerah dengan aktor eksternal partai, terutama dengan Presiden Jokowi. Hubungan ini bisa berupa komunikasi tidak resmi, afiliasi dalam acara politik tertentu, atau dukungan terselubung terhadap pasangan capres yang tidak diusung oleh partai. Kedua, inkonsistensi pesan kampanye menjadi indikator dari lemahnya kohesi internal. Di beberapa daerah, ditemukan caleg yang tidak mencantumkan gambar capres resmi PDIP (Ganjar) atau justru menampilkan figur Gibran/Jokowi sebagai strategi elektabilitas. Hal ini mencerminkan fragmentasi strategi dan pelemahan kontrol vertikal dari DPP. Ketiga, respons terhadap tekanan politik dari aktor nasional di luar struktur DPP, seperti manuver politik dari relawan Jokowi atau tekanan dari kelompok pengusaha yang mendukung pasangan lain. Kader yang menunjukkan ambiguitas posisi dalam menghadapi tekanan ini dapat menjadi sinyal terjadinya fragmentasi elite di lapisan bawah partai.

Dengan demikian, loyalitas politik dan fragmentasi elite bukan hanya menjadi gejala internal partai, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap pola strategi pemenangan di lapangan. Penelitian ini memosisikan keduanya sebagai variabel penting untuk memahami bagaimana partai besar seperti PDIP mempertahankan kohesi dan efektivitas elektoral di tengah dinamika konflik internal dan tekanan eksternal yang kompleks. Integrasi kedua konsep ini dalam kerangka teori pusat-pinggiran Wallerstein memungkinkan analisis yang lebih tajam terhadap strategi adaptif kader partai di akar rumput dalam menjaga keseimbangan antara loyalitas struktural dan kelangsungan politik elektoralnya sendiri.

Metode

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif di mana penelitian ini tidak memerlukan hipotesis (Murdiyanto, 2020). Jenis penelitian ini berupa studi kasus yang akan meneliti secara mendalam dan detail terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian. Pendekatan studi kasus digunakan karena terdapat rumusan kasuistik antara aktor politik yang ada di pusat dengan aktor politik yang ada di pinggiran. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan wawancara secara tatap muka dan melalui pengumpulan dokumentasi. Analisis dan interpretasi data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari lima informan inti yang dipilih secara sengaja dengan kriteria sebagai calon anggota legislatif fraksi PDIP di Kota Surakarta dan calon anggota legislatif fraksi PDIP di Kabupaten Magelang. Adapun informan pendukungnya terdiri dari tiga yang berasal dari anggota PDI Perjuangan maupun tim pemenang PDIP.

Tabel 1. Data Informan

No	Informan	Tipe Informan	Gender	Waktu Interview
1	Heru Suprabu	Informan Kunci	Laki-Laki	04 Sept, 2024
2	Wahyu Haryanto	Informan Utama	Laki-Laki	06 Sept, 2024
3	Janjang Sumaryono Aji	Informan Utama	Laki-Laki	06 Sept, 2024
4	Roro Indradi Sarwo Indah	Informan Utama	Perempuan	06 Sept, 2024
5	Sakir	Informan Utama	Laki-Laki	13 Sept, 2024
6	Kartika Budi Afriyanti	Informan Utama	Perempuan	16 Sept, 2024
7	Wasis	Informan Pendukung	Laki-Laki	13 Sept, 2024
8	Ahmad Syaiful Febri	Informan Pendukung	Laki-Laki	14 Sept, 2024
9	Samoedra Rizki Arifian Hesta	Informan Pendukung	Laki-Laki	16 Sept, 2024

Data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Cara memperoleh data primer yakni dilakukan dengan wawancara kepada informan utama dan informan pendukung. Adapun cara memperoleh data sekunder yakni melalui dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Pada pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 terjadi situasi yang menghangat mulai dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengubah batas usia pendaftar Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden hingga menyebabkan konflik internal terbuka dalam PDI Perjuangan karena disinyalir bahwa Jokowi memiliki preferensi dukungan tersendiri di luar calon yang telah diusung PDI Perjuangan yaitu Ganjar-Mahfud (Ambat & Lesmana, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemilu tahun 2024 menunjukkan dinamika politik yang gejolaknya sangat terasa terutama bagi PDI Perjuangan.

Bagian ini menyajikan temuan lapangan dari studi kasus calon legislatif PDI Perjuangan di daerah pemilihan Jawa Tengah pada Pemilu 2024, dengan fokus pada strategi kemenangan di tengah konflik elite partai antara DPP PDIP dan Presiden Joko Widodo. Analisis dilakukan secara tematik, dengan merujuk pada tiga kerangka utama: teori pusat-pinggiran Wallerstein, konsep loyalitas politik (Panebianco, 1988), dan dinamika fragmentasi elite (Higley & Burton, 2006). Temuan-temuan yang disajikan merupakan hasil wawancara mendalam dengan lima informan utama (caleg, pengurus cabang, dan tim kampanye), ditunjang oleh dokumentasi kampanye dan pengamatan lapangan.

Kontestasi Politik dan Kepatuhan Ideologis dalam Pemilihan Umum 2024

Pelaksanaan pemilu pada tahun 2024 digelar untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPRD, dan Anggota DPD. Pesta rakyat yang digelar pada 2024 ini alih-alih diharapkan mampu memberikan perubahan bagi negara Indonesia, namun yang terjadi justru menggambarkan salah satu bentuk kekacauan dalam dunia politik bangsa Indonesia.

Kekacauan diawali oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia yang melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam waktu singkat terhadap ketentuan syarat usia bagi Calon Presiden maupun Calon Wakil Presiden Republik Indonesia.

Revisi yang dilakukan MK ini disinyalir sebagai awal kekacauan Pemilu 2024 di mana kondisi yang tidak stabil tersebut salah satunya dirasakan oleh PDI Perjuangan. Bermula dari pencalonan Capres dan Cawapres 2024, ketika PDI Perjuangan telah menentukan kandidatnya yang akan menjadi Capres yakni Ganjar Pranowo dengan pasangan Mahfud MD sebagai Cawapres. Namun dengan adanya revisi MK tersebut kemudian memberikan peluang kepada Gibran Rakabumingraka seorang putra Presiden RI yakni Joko Widodo (Jokowi) untuk turut berpartisipasi dan mencalonkan dirinya sebagai Cawapres dengan pasangan Prabowo Subiyanto sebagai Capres. Prabowo dan Gibran ini diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mana pencalonan Gibran sebagai Cawapres ini tentu menyita perhatian publik karena bagaimanapun secara resmi Gibran masih tergabung sebagai anggota PDI Perjuangan, sedangkan PDI Perjuangan juga telah memiliki kandidat tersendiri yakni Ganjar. Selain itu, tentu saja Jokowi memiliki preferensi tersendiri dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Sikap yang diambil oleh Jokowi dan Gibran ini tidak mencerminkan loyalitas seorang kader terhadap partainya dan justru mencerminkan adanya kepentingan pribadi untuk keuntungan pribadi yakni berupa politik dinasti. Dari sinilah kemudian muncul keretakan antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan yaitu Megawati Soekarno Putri dengan Jokowi. Selain memiliki preferensi sendiri, Jokowi juga telah menyampaikan bahwasanya dirinya akan ikut campur dalam Pilpres 2024. PDI Perjuangan yang sebelumnya telah memasang target *hattrick* dalam Pilpres karena efek positif Jokowi kemudian berbalik arah dan menganggap Jokowi sebagai boomerang bagi PDI Perjuangan karena mempengaruhi citra dan elektabilitas PDI Perjuangan. DPP PDI Perjuangan, Megawati mengambil langkah tegas dalam menghadapi kondisi ini yakni dengan mengeluarkan perintah kepada para caleg untuk ikut memenangkan Capres dan Cawapres yang diusung PDI Perjuangan yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Instruksi tersebut berjudul “Instruksi Bergerak Secara Masif Memenangkan Pemilu 2024” dengan nomor 5775/IN/DPP/XII/2023.

“...Tapi kalau PDIP itu kuncinya tegak lurus itu. Karena boleh disebut terpimpin, barisan itu lo barisan. Makanya kalau yang tidak mau ikut barisan ya jangan di PDIP, karena di PDIP itukan partainya inklusif, terbuka, yang penting kita masuk, asal Pancasila ya itu kan masuk. Terlepas dari itu ya gabooleh masuk. Dan begitu kita masuk ke PDIP ya kita merupakan bagian daripada barisan.” (Wasis, 2024)

Dalam hal ini, Megawati sebagai aktor sentral (center) dalam struktur PDI Perjuangan mengambil langkah masifikasi sebagai salah satu bentuk strategi konsolidasi kelembagaan dan penguatan basis dukungan. Selain itu, langkah yang diambil oleh DPP PDI Perjuangan, Megawati merupakan keputusan untuk tetap menjaga kestabilan mesin politik dalam PDI Perjuangan. Sebagaimana disampaikan sebelumnya ketika partai politik dimaknai dalam arti organisasi maka

yang terjadi di pusat akan berpengaruh hingga ke daerah, dan inilah yang sedang dihadapi PDI Perjuangan. Instruksi Megawati untuk memenangkan PDI Perjuangan dalam Pemilu 2024 tidak hanya ditujukan bagi Capres dan Cawapres saja namun seluruh kader PDI Perjuangan termasuk Calon Anggota Legislatif. Jika tidak ada instruksi yang dikeluarkan secara tegas, dikhawatirkan guncangan dalam PDI Perjuangan semakin kuat. Adapun berdasarkan data di atas yang disampaikan oleh Bapak Wasis selaku ketua PAC Salaman menunjukkan bahwa kader PDI Perjuangan sebagai bagian pinggiran (*periphery*) memiliki prinsip “tegak lurus” dan menjadi kesatuan dalam sebuah “barisan” yang artinya seluruh kader PDI Perjuangan bergerak bersama dalam barisan tersebut di bawah komando ketua umum yang saat ini dijabat oleh Megawati.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan prinsip “tegak lurus” tidak hanya ditentukan oleh DPP PDI Perjuangan saja namun juga seluruh kader PDI Perjuangan. Oleh karena itu, seluruh kader PDI Perjuangan harus patuh dan konsisten melaksanakan Instruksi Bergerak Secara Masif Memenangkan Pemilu 2024 dengan tanpa ada yang diperbolehkan melakukan forum pembahasan terkait instruksi ini di dalam maupun di luar partai politik. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Bapak Wahyu sebagai berikut.

“Ya jadi begini, kalau di kami itu kami belajar tegak lurus karena tegak lurus ketika kongres ketua umum diberikan prerogative. Apapun yang sudah diberikan ketua umum dan ditandatangani itu tidak kami yang sebagai kader tidak ada untuk mendiskusikan di luar, kalau mau diskusi rasan-rasan di dalam. Tapi di dalampun itu tidak boleh didiskusikan karena nanti kesolidan dan kedisiplinan akan terganggu. Jadi sata ketika rekomendasi kepala itu sudah turun maka hukumnya wajib dimenangkan.” (Wahyu, 2024)

Pernyataan di atas juga diperkuat oleh Bapak Sakir selaku Caleg Fraksi PDI Perjuangan di Kabupaten Magelang bahwa:

“Ya setiap kader pasti mbak, semampunya kita mengikuti arahan DPP, arahan DPD dan kita lakukan di lapangan. Kan Bu Mega selalu menyampaikan setiap kader harus turun turun ke bawah mengambil hati dari masyarakat. Ya itu sudah kami lakukan dengan cara-cara atau strategi dari masing-masing kader akan berbeda-beda, tapi instruksi dari pusat pasti akan dilakukan dan dijalankan.” (Sakir, 2024)

Instruksi ini berhasil menyelamatkan PDI Perjuangan dalam menghadapi guncangan konflik internal yang sedang dihadapi antara Megawati dengan Jokowi. Seluruh kader termasuk Calon Anggota Legislatif di daerah juga dapat melaksanakan strategi kemenangan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, meskipun partai politik dimankai sebagai organisasi, namun jika manajemen yang dilakukan dalam internal partai politik tersebut dilaksanakan dengan baik tentunya konflik yang terjadi di pusat dapat ditangani agar tidak berpengaruh terhadap kesatuan kecil di daerah dan hal ini tercermin pada PDI Perjuangan. Namun begitu sebaliknya, jika kesolidan partai tidak lagi kuat, maka yang terjadi adalah ketika PDI Perjuangan mengalami

guncangan konflik elite maka mesin politik akan ikut berhenti dan menghambat kemenangan PDI Perjuangan dalam pemilu.

Dengan demikian, Salah satu temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tekanan dari luar struktur partai, mayoritas calon legislatif tetap menunjukkan loyalitas terhadap garis politik DPP. Ini tercermin dalam penggunaan jargon “tegak lurus” yang secara konsisten disampaikan dalam forum internal maupun saat kampanye terbuka. Penggunaan atribut partai, serta penolakan eksplisit terhadap manuver politik Gibran atau kelompok relawan Jokowi menjadi indikator kuat dari loyalitas struktural ini. Strategi “tegak lurus” ini juga mencerminkan bagaimana perintah dari pusat diterjemahkan di pinggiran tanpa modifikasi berlebihan, di mana hal ini sejalan dengan teori pusat-pinggiran Wallerstein.

Strategi Caleg Fraksi PDI Perjuangan di Tengah Konflik Elite

Dalam pelaksanaan pemilu, baik partai politik maupun kandidat akan berusaha dapat membuat pemilih yaitu masyarakat untuk tertarik dan memilih partai politik maupun kandidat tersebut. Adapun cara yang dilakukan dalam menarik perhatian masyarakat yakni melalui penawaran visi, misi dan program yang nantinya akan direalisasikan guna menjawab kebutuhan serta harapan dari masyarakat itu sendiri. Palsunya keberhasilan partai politik dan kandidat dalam kontestasi politik ini tidak terlepas dari runtutan proses mulai perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan secara matang kemudian monitoring serta evaluasi secara konsisten. Memenangkan kompetisi politik ini tentunya memerlukan strategi politik yang juga dimaksudkan agar kemenangan politik, baik berupa dukungan politik maupun perolehan suara dapat didapatkan secara efektif dan efisien (Sahea et al., 2018).

Persaingan yang semakin ketat dalam pemilihan legislatif 2024 dikarenakan sistem multipartai di mana terdapat 24 partai politik yang turut berpartisipasi diantaranya 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh. Menghadapi kontestasi pemilu 2024 PDI Perjuangan mempersiapkan berbagai strategi pemenangan politik yang akan digunakan untuk memenangkan suara termasuk dalam pemilihan legislatif. Sesuai dengan identitas PDI Perjuangan yang dikenal sebagai partai “*pro wong cilik*”, maka strategi pemengan politik yang diterapkan PDI Perjuangan ini menggunakan pendekatan kepada masyarakat kelas bawah, sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Wahyu selaku Calon Anggota Legislatif Kota Surakarta yang menyatakan bahwa:

“Ya tadi, turun ke bawah, tidak membelakangi rakyat. Jadi apalagi saya punya prinsip begini, dulu saya ketika nyalon pertama kali butuh dukungan rakyat. Saya kembalikan diri saya dulu ketika saya butuh suara, saya minta ke mereka. Nah sekarang ketika saya jadi, mereka hanya butuh saya datang. Diundang ini, datang saja sudah. Jadi sampai di situ saya percaya bahwa Pak Lurah saya yang ngasih tahu untuk tidak usah nyebar apapun biar masyarakat nantinya menilai sendiri. Saya sebetulnya organisasi modern, tapi begitu turun ke wong cilik gausah mikir ini itu. Saya punya ajaran yaitu SLJJ, S-nya *Sonjo (Dolan)* kita harus ndolani ke rakyat, datang ke pertemuan, ada kerja bakti ya datang. Terus kemudian, L-nya *Layat*. Kalau ada orang meninggal atau tetangga meninggal saya selalu tanamkan, missal “Pak Wahyu saya ada sodara meninggal kirim

lelayu”. Saya kasih contoh lagi, ini bukan di kelurahan saya ada yang meninggal ya saya layat kalau tidak dinas luar kota. Jadi ini mbak, ini nggak sekali dua kali. Udah, kita datang aja. Nah J-nya *Jagong. Jagong* itu kondangan datang ke pesta pernikahan. Jadi kalau kita diundang, kenal gak kenal gausah takok iki sopo, ada waktu datang, gaada waktu istri saya yang saya suruh datang. J satunya ya *Jagongan. Jagongan* itu ya kalau ada orang ronda pos ronda tekoni atau wedangan tadi. Itu SLJJ.” (Wahyu, 2024)

Berdasarkan data di atas salah satu bentuk pendekatan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Bapak Wahyu di Kota Surakarta yakni menggunakan strategi SLJJ atau kepanjangan dari *Sonjo (Dolan), Layat, Jagong, dan Jagongan*. Kegiatan dalam strategi pemenangan politik SLJJ ini merupakan kegiatan yang sangat dekat dengan masyarakat dan berhubungan langsung. Melalui berbagai kegiatan dalam SLJJ, masyarakat dapat merasakan kehadiran dari seorang legislatif secara langsung. Kader PDI Perjuangan menyadari bahwa salah satu cara agar kader tetap relevan dan dapat berkontribusi adalah dengan membangun kedekatan dengan masyarakat. Kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat ini diharapkan dapat juga untuk mendengarkan aspirasi dan mengedepankan nilai-nilai ideologi partai dalam interaksi tersebut. Hal ini juga berfungsi untuk menjaga agar kader tetap terlihat sebagai figur yang mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan hanya berfokus kepada urusan internal partai yang menguntungkan elite politik.

Tidak hanya dengan kegiatan SLJJ saja, tiap calon anggota legislatif PDI Perjuangan memiliki caranya sendiri-sendiri. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Ibu Roro sebagai berikut:

“Saya selalu ada untuk masyarakat selama perjalanan kemudian ketika kampanye kan saya banyak *door to door*. Itu yang saya lakukan, njenengan bisa cek ke polres, karena kita kan selalu ijin dan selalu mereka ngawal, jadi ada intel, panwas kelurahan pasti juga ngawal kalo *door to door*. Kalau itu kan istilahnya namanya pertemuan tatap muka, istilahnya KPU. Tapi kalau pertemuan yang di suatu ruangan kan pertemuan terbatas. Jadi dalam masa kampanye saya jarang melakukan pertemuan terbatas. Saya selalu jalan, *door to door* ke masyarakat, menyapa masyarakat dan dengan murah kok mbak, aku mung nggowo MUG atau ketika dulu saya sudah pertemuan sudah membawa MUG misalnya tapi saya mulang di wilayah itu lagi untuk keliling ya paling tak gowokke roti, roti sekotak gitu aja. Saya gapernah pakai uang pake apa, enggak. Kalau strategi sebenarnya kita sudah lebih massif ya, dalam arti wes lebih itu ya tapi tetep kalah daripada yang lalu. Kalau yang lalu itukan istilahnya kita ini masih pemenang, jadi apapun ketoke kan gada saingan yang sepadan.” (Roro, 2024)

PDI Perjuangan selalu mengajarkan kadernya untuk dekat dengan masyarakat karena bagaimanapun pada saat perebutan suara maka mereka membutuhkan dukungan dari masyarakat.

Pendekatan kepada masyarakat boleh saja dilakukan dengan cara bersamaan maupun *door to door* dari masyarakat satu ke masyarakat lain. Calon Anggota Legislatif fraksi PDI Perjuangan berfokus untuk dapat membantu kebutuhan masyarakat luas selama masa kampanye dibandingkan mendikte tiap kepala untuk memilih dirinya dan menjatuhkan calon anggota legislatif lainnya. Kerja nyata yang telah diberikan oleh Caleg PDI Perjuangan pada masa jabatan periode sebelumnya juga menunjukkan bahwa komitmen untuk tetap mengutamakan kepentingan masyarakat merupakan komitmen yang harus dijaga dan terus dilakukan.

Dalam menghadapi perbedaan kondisi pemilu 2024 yakni dengan adanya konflik elite dalam internal PDI Perjuangan ini, maka caleg PDI Perjuangan melaksanakan strategi pemenangan dengan bersamaan menjalankan Instruksi Bergerak Secara Masif Memenangkan Pemilu 2024.

“Ya iya. Itu harus saya laksanakan. Ini partai dek, kalau di tentara sudah komando.” (Janjang, 2024)

Dalam kondisi konflik internal PDI Perjuangan, DPP PDI Perjuangan mengajarkan seluruh kadernya untuk dapat beradaptasi dengan cepat namun tetap berkerja sesuai instruksi resmi tanpa harus terpengaruh kondisi yang ada. Kader diarahkan untuk terus membangun kedekatan dengan masyarakat sebagaimana mestinya sesuai dengan ideologi partai dan menekankan pada apa yang dapat mereka berikan terhadap masyarakat sebagai pemilih dibanding ikut terjebak di dalam konflik internal di level atas. Meskipun terjadi ketegangan elite, kader tidak boleh larut dalam hal tersebut. Sebaliknya, kader harus fokus pada kerja politik dengan tetap menjalankan strategi pemenangan mereka, melaksanakan instruksi yang diberikan oleh DPP PDI Perjuangan dan memperkuat dukungan dari akar rumput. Dengan demikian, meskipun terjadi ketegangan di atas antar tokoh besar, strategi pemenangan yang dilakukan oleh kader PDI Perjuangan tetap berjalan dengan sistematis sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam membuat strategi pemenangan.

Dalam situasi ini, maka dapat juga dilakukan analisis teori pusat-pinggiran sebagaimana terdapat pada tabel 1 berikut:

Tabel 2. Implementasi Teori Pusat-Pinggiran dalam konteks dinamika internal PDIP

	Deskripsi Aktor
Pusat	Megawati sebagai aktor telah menerapkan masifikasi anggota dan onderbouw PDIP di daerah, seperti Banteng Muda Indonesia (BMI) dan Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi).
Pinggiran	Aktor-aktor dari BMI dan Bamusi melakukan pemenangan dengan cara mengadakan pasar murah, tradisi <i>jagongan</i> dan menyelenggarakan relawan melayani warga yang meninggal. Selain itu, terdapat konflik internal antara aktor pengikut Megawati dengan Joko Widodo, sehingga tercatat kondisi elektabilitas PDIP menurun di Jawa Tengah.

Secara keseluruhan, kader PDIP memanfaatkan struktur partai yang telah mapan di level ranting dan anak ranting untuk memperkuat basis dukungan. Konsolidasi dilakukan melalui kegiatan sosial, pertemuan kader, dan pelibatan tokoh lokal yang berafiliasi dengan partai. Hal ini menunjukkan bahwa strategi partai di pinggiran tidak hanya bersifat reaktif terhadap dinamika pusat, melainkan memiliki otonomi dalam menjalankan konsolidasi elektoral berbasis jaringan relasional dan sejarah loyalitas komunitas.

Selain itu, Strategi kampanye berbasis budaya politik lokal menjadi salah satu temuan yang menonjol. Konsep SLJJ—Sonjo (sowan), Layat (melayat), Jagong (hadiri hajatan), dan Jagongan (nongkrong)—digunakan sebagai pendekatan informal untuk menjangkau konstituen secara personal. SLJJ menjadi bentuk adaptasi dari pinggiran terhadap konteks sosiokultural lokal yang tidak bisa dijangkau oleh instruksi politik formal dari pusat. Strategi ini sekaligus memperlihatkan bagaimana loyalitas ideologis dipadukan dengan pendekatan kultural, yang memperkuat efektivitas kampanye berbasis kedekatan emosional.

Sikap kader terhadap ketegangan antara DPP dan Presiden Jokowi menunjukkan varian respons. Beberapa kader secara terbuka menyatakan kekecewaan terhadap langkah Jokowi mendukung Gibran, namun tetap memilih diam di ruang publik untuk menjaga harmoni dengan konstituen yang pro-Jokowi. Di sisi lain, ada pula kader yang mencoba mengaburkan posisi dengan tetap menggunakan citra Jokowi dalam alat peraga kampanye. Situasi ini mencerminkan dinamika fragmentasi elite yang menembus hingga tingkat operasional kampanye. Di satu sisi, terdapat kepatuhan simbolik terhadap garis partai. Di sisi lain, ada kalkulasi elektoral yang membuat kader melakukan navigasi diskursif terhadap dua kutub elite.

Berbagai temuan di atas memperlihatkan bahwa loyalitas terhadap DPP tidak bersifat mutlak, tetapi dinegosiasikan dalam ruang yang penuh kompromi antara kepentingan elektoral dan garis ideologis. Melalui kerangka pusat–pinggiran, dapat dilihat bahwa aktor pinggiran tidak pasif, melainkan aktif dalam mentransformasikan mandat politik pusat ke dalam bentuk strategi lokal yang sesuai dengan konteks budaya dan tekanan elektabilitas. Fragmentasi elite menjadi tantangan, tetapi juga menjadi ruang kreatif kader untuk menegosiasikan posisi tanpa secara terbuka melawan struktur pusat.

Kesimpulan

Megawati sebagai seorang aktor nasional (DPP-PDIP Pusat) telah melakukan masifikasi kepada organisasi sayap PDIP (*onderboun*) berupa instruksi politik, lalu reaksi dari aktor-aktor di daerah (pinggiran) yakni melakukan pemenangan dengan cara mengadakan aktivitas sosialisasi politik seperti pasar murah, *tradisi jagongan* dan pelayanan terhadap warga konstituen PDIP. Dalam lingkup ini, konflik yang terjadi antara DPP-PDIP dengan Jokowi mengguncangkan internal PDIP. Namun, Megawati sebagai aktor sentral mengambil langkah tegas dengan memberikan instruksi terhadap setiap kader PDIP. Fenomena Pemilu 2024 dengan konflik elit di PDIP menunjukkan kerja politik yang fokus terhadap masifikasi daerah pinggiran dan berbasis pada instruksi resmi, tetap menjadi kunci utama dalam memenangkan pemilu dan menjaga kekuatan partai di mata konstituen PDIP.

Secara keseluruhan, hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemenangan calon legislatif PDI Perjuangan dalam Pemilu 2024 tetap dapat dijalankan secara terstruktur dan konsisten meskipun partai tengah menghadapi konflik elite internal antara DPP

dan Presiden Joko Widodo. Melalui pendekatan studi kasus di Jawa Tengah, ditemukan bahwa kader PDIP di tingkat daerah mengadopsi strategi “tegak lurus” terhadap garis partai pusat, terutama dalam mendukung calon presiden Ganjar Pranowo dan dalam menjaga konsistensi ideologis partai. Strategi tersebut dijalankan melalui mesin partai yang sudah mapan, penguatan basis akar rumput, serta pemanfaatan pendekatan kultural lokal seperti pola SLJJ (Sonjo, Layat, Jagong, Jagongan).

Meskipun demikian, loyalitas terhadap DPP tidak bersifat absolut. Kader di daerah menunjukkan respons yang beragam terhadap fragmentasi elite, terutama dalam menyikapi tekanan elektoral dari simpatisan Jokowi dan manuver politik Gibran. Dalam situasi ini, mereka mengembangkan bentuk loyalitas diskursif yang bersifat strategis: tetap menggunakan simbol-simbol ideologis PDIP, namun secara taktis menyisipkan elemen visual atau narasi yang beririsan dengan Jokowi untuk mempertahankan dukungan konstituen.

Strategi yang dijalankan oleh aktor pinggiran ini mencerminkan bentuk adaptasi struktural dan kultural terhadap ketegangan politik di pusat. Dengan menggunakan kerangka teori pusat–pinggiran Wallerstein, penelitian ini memperlihatkan bahwa relasi antara DPP (pusat) dan kader daerah (pinggiran) bersifat hirarkis namun fleksibel. Di sisi lain, integrasi konsep loyalitas politik dan fragmentasi elite memungkinkan pembacaan yang lebih tajam terhadap bagaimana dinamika internal partai dimediasi di tingkat lokal.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis pada tiga level. Pertama, memperluas penerapan teori pusat–pinggiran dalam konteks studi partai politik, khususnya dalam menjelaskan relasi vertikal antara elite pusat dan kader lokal dalam situasi konflik internal. Kedua, menguatkan pemahaman bahwa loyalitas politik bukan hanya ekspresi kepatuhan struktural, tetapi juga strategi adaptif yang dijalankan kader untuk menjaga keseimbangan antara garis partai dan kepentingan elektoral. Ketiga, menawarkan model analitis tentang fragmentasi elite sebagai fenomena yang berdampak tidak hanya pada level elite nasional, tetapi juga pada strategi kampanye mikro di tingkat daerah.

Secara umum, penelitian ini telah memberikan pemahaman yang signifikan terkait topik strategi pemenangan calon legislatif PDIP dalam Pemilu 2024 di tengah adanya konflik elit dan kontestasi politik antar aktor DPP-PDIP dengan Jokowi. Namun, studi ini masih terbatas pada wilayah Jawa Tengah dengan *sample* di Kota Surakarta dan Kabupaten Magelang. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat melakukan penelitian pada wilayah yang lebih luas untuk eksplorasi lebih lanjut. Selain itu, penelitian komparatif antardaerah atau antarpantai dapat dilakukan untuk melihat bagaimana strategi pemenangan dijalankan dalam partai dengan struktur organisasi yang berbeda, seperti Golkar, PKS, atau Gerindra. Penelitian selanjutnya juga dapat berfokus pada pendekatan kuantitatif berbasis survei terhadap pemilih dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana loyalitas simbolik terhadap partai memengaruhi preferensi elektoral di tengah fragmentasi elite. Terakhir, eksplorasi lebih lanjut terhadap peran budaya politik lokal dalam kampanye dapat menjadi kontribusi penting dalam memperkaya khazanah ilmu politik berbasis konteks Indonesia.

Referensi

- Ambat, Y. T., & Lesmana, F. (2024). *Megawati VS Jokowi di Pemilu 2024 (Analisis Semiotika Desain Sampul Majalah Tempo “ Bara Dalam Sekam Jokowi - Mega ”)*. 13(2), 251–264. <https://doi.org/10.33508/jk.v13i2.6012>
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Buehler, M. (2021). *Democracy and clientelism in Indonesia: Control and consent in the electoral arena*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108896276>
- Butler, J., & Le, C. (n.d.). *Fifty Key Sociologists The Contemporary Theorists*. <https://doi.org/https://api.taylorfrancis.com/content/books/mono/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9780203128909&type=googlepdf#page=235>
- Habibullah, A., Suparto, D., & Sutjiatmi, S. (2022). Analisis Modal Sosial Dalam Kemenangan Pilkada Pemalang Tahun 2020. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.20961/jas.v11i1.55134>
- Hawari, N. (2019). Konflik Elit Partai Berbasis Agama Dan Rekrutmen Calon Kepala Daerah Di Provinsi Lampung. *Jurnal Review Politik*, 09, 165–188. <https://doi.org/http://jurnaluf.uinsby.ac.id/index.php/JRP/article/download/1266/1260>
- Heriyanto, A. A. A., & Solihah, R. (2023). Strategi Pemanfaatan Modal Politik Dan Modal Sosial Calon Anggota Legislatif Menghadapi Pemilu Legislatif 2024. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(2), 366. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.366-374>
- Higley, J., & Burton, M. G. (2006). *Elite foundations of liberal democracy*. Rowman & Littlefield.
- Khasanah, R. P. (2022). Modal Sosial Partai Keadilan Sejahtera Kota Batam dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019. *Jurnal Trias Politika*, 6(1), 1–11. <https://doi.org/10.33373/jtp.v6i1.3935>
- Kodiyat MS, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i1.2756>
- Lubis, L. L. (2017). Strategi Zukri dalam Memperoleh Suara Pada Pemilihan Legislatif Provinsi Riau Tahun 2014. *Jom FISIP*, 4(1), 1–10. [https://gain.fas.usda.gov/Recent Publications/Agricultural Biotechnology Annual_Ottawa_Canada_11-20-2018.pdf](https://gain.fas.usda.gov/Recent%20Publications/Agricultural%20Biotechnology%20Annual_Ottawa_Canada_11-20-2018.pdf) <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101869> <http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.06.039> <http://www.oecd.org/gov/regulatory-poli>
- Murdiyanto, Eko. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Panbianco, A. (1988). *Political parties: Organization and power*. Cambridge University Press.
- Plaituka, I. R. R., Azhar, M. A., & Noak, P. A. (2018). Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Pemenangan Calon Anggota Legislatif Pasca Pindah Dapil Pada Pemilu Legislatif Kota Surabaya Tahun 2014. *E-Jurnal Politika*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index.php/politika/article/view/37666>
- Pradityo, R. (2018). PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK SECARA MUFAKAT DAN DEMOKRATIS / DISPUTE RESOLUTION OF INTERNAL POLITICAL PARTIES IN CONSENSUS AND DEMOCRATIC. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(3), 375. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.375-386>
- Rahagi, E. (2019). Marketing Politik Pemenangan Pemilu Legislatif DPR RI Abraham Sridjaja pada Daerah Pemilihan Jawa Timur 1 (Surabaya-Sidoarjo) sebagai Calon Legislatif

- Milenial Partai Golkar. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Ramadhany, D., & Rahmawati, D. E. (2020). Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarki dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 39–62. <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i1.7237>
- Rosyid Halimur. (2019). Strategi Pemenangan Caleg Partai Gerindra pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 (Studi Tentang Marketing Politik Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(1), 60–73. <https://doi.org/https://ejournal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/1355>
- Safrudiningsih, Dina Sudarmika, dan S. (2023). PDIP dan Megawati dalam Dinamika Politik Indonesia 2014-2024 Akademi Televisi Indonesia 2. *Journal Visioner: Journal of Media and Art*, 04(2), 64–79. https://journal.atvi.ac.id/index.php/jurnal_visioner/article/view/41
- Sahea, R., Niode, B., & Tulung, T. (2018). Analisis Strategi Politik Sri Wahyuni Maria Manalip-Petrus Simon Tuange dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 3–8. <https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/21561>
- Sanjaya, R. (2017). Pemasaran Politik Caleg Pendatang Baru Dalam Pemilu (Studi Kasus Wardi Ningsih Caleg Pan Dapil 1 Kabupaten Lamandau). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 8(1), 103. <https://doi.org/10.14710/politika.8.1.2017.103-112>
- Scarrow, S. E. (2006). *The nineteenth-century origins of modern political parties: The unwanted emergence of party democracy*. In R. Gunther, J. R. Montero, & J. J. Linz (Eds.), *Political parties: Old concepts and new challenges* (pp. 16–37). Oxford University Press.
- Sepriansyah, M., Yazwardi, & Yulion, Z. (2021). Strategi dan Marketing Politik Caleg Anwar Al Sadat Dalam Pileg 2019 Dapil Palembang II Sumsel. *Journal on Politics and Islamic Civilization*, 2(2), 809–820. <https://doi.org/https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Ampera/article/download/7864/4052/28249>
- Simamora, J., & Rusadi, U. (2024). *Dawatuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting Pertarungan Makna Atas Pernyataan Cave-Cave Presiden Jokowi Mengenai Pemilu 2024 di Media Indonesia*. 4, 489–502. <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v4i1.4933>
- Tomsa, D. (2020). Party cohesion in Indonesia: The case of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P). *South East Asia Research*, 28(1), 25–40. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2019.1706459>
- Wallerstein, I. (1974). *The modern world-system I: Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century*. Academic Press.
- Wallerstein, I. (2020). *World-systems analysis: An introduction*. Duke University Press.